



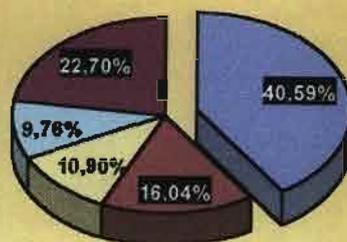
ISBN.979.466.352.2
11562.9803

RINGKASAN EKSEKUTIF

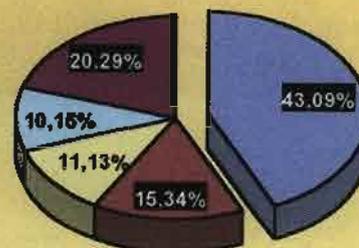
TINJAUAN EKONOMI DAERAH ISTIMEWA ACEH 1994 - 1997

Peranan Sektoral PDRB 1996 Dan 1997

1996



1997



- Pertanian
- Industri
- Pengangkutan
- Perdagangan
- Lainnya

BPS

BADAN PUSAT STATISTIK

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Jalan. Tgk. H.M. Daud Beureueh No 50 Telp (0651) 23005 Faks 33632

E-Mail : bps1100@aceh.wasantara.net.id BANDA ACEH 23121

**TINJAUAN EKONOMI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

*Economy Perspective
Of Daerah Istimewa Aceh
1994 -1997*

ISBN.979 - 466 - 352 - 2

**Nomor Publikasi/Publication Number
11562.9803**

NASKAH/Editor:

**Seksi Neraca Produksi/ Production Account Section
Bidang Pengolahan Neraca Wilayah dan Analisis
Division of Processing Regional Account and Analysis**

PENERBIT/Published by:

**BPS Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Central Board of Statistic of Daerah Istimewa Aceh Province**

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya.
May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

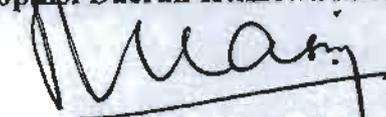
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data yang sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi maupun perencanaan pembangunan suatu wilayah. Baik pada tingkat propinsi, wilayah maupun kabupaten / kotamadya, data PDRB sangat dibutuhkan keberadaannya.

Dalam Ringkasan Eksekutif ini disajikan informasi ringkas mengenai keadaan perekonomian Daerah Istimewa Aceh yang ditinjau dari indikator yang berupa PDRB menurut lapangan usaha, menurut penggunaan, serta beberapa ulasan ringkas tentang perkembangan ekonomi secara makro di Daerah Istimewa Aceh.

Ringkasan Eksekutif ini diharapkan dapat berguna bagi para eksekutif pada khususnya, dan pengguna data umumnya. Sedangkan data PDRB secara rinci baik konsep dan defenisi disajikan dalam publikasi bentuk lain.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terwujudnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih.

Banda Aceh, Nopember 1998
Kepala Badan Pusat Statistik
Propinsi Daerah Istimewa Aceh



H.M. Nasir Syarbaini, SE
NIP. 340003769

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	iii
1. Pendahuluan.....	1
2. Kondisi Perekonomian.....	1
3. Peranan Sektor Ekonomi.....	5
4. PDRB Perkapita.....	6
5. PDRB Menurut Penggunaan.....	8
6. Tingkat Inflasi.....	9
7. Kebutuhan Investasi.....	11
8. Keterkaitan Investasi dengan Perekonomian Daerah Istimewa Aceh.....	11
9. Ekspor dan Impor.....	13
10. Analisa Perekonomian Daerah Istimewa Aceh Melalui Tabel Input-Output.....	15

Daftar Tabel

Tabel.1 PDRB Propinsi Daerah Istimewa Aceh 1994 – 1997.....	2
Tabel.2 Laju Pertumbuhan PDRB dan Distribusi PDRB D.I. Aceh 1996-1997 (non migas).....	4
Tabel.3 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita - Propinsi D.I. Aceh.....	6
Tabel.4 Laju Pertumbuhan PDRB D.I. Aceh Menurut Pengeluaran Tahun 1996-1997 dan peranannya Terhadap PDRB.	8
Tabel.5 Laju Inflasi Propinsi D. I. Aceh tahun 1994-1998	10
Tabel.6 <i>Gross Domestic Saving</i> (GDS), dan <i>Gross Domestic - Investment</i> (GDI) Propinsi D.I. Aceh Tahun 1993- 1997 (dalam persen).....	12
Tabel.7 Nilai ICOR tahun 1993-1997 Propinsi D.I Aceh	13
Tabel.8 Nilai Ekspor Impor Non Migas D.I. Aceh.....	14
Tabel.9 Sektor Sektor Ekonomi dengan Keterkaitan Kedepan (DP) Dan Keterkaitan Kebelakang (DK) Propinsi D.I. Aceh.....	17

Daftar Grafik

Grafik.1 PDRB Propinsi Daerah Istimewa Aceh 1994 – 1997.....	3
Grafik.2 Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Aceh Tahun 1997 (non migas).....	4
Grafik.3 Peranan Sektoral PDRB 1996 dan 1997	5
Grafik.4 Peranan Penggunaan Terhadap PDRB (persen).....	9
Grafik.5 Laju Inflasi Propinsi D. I. Aceh tahun 1994-1998	10

Kualitas sumber daya manusia menuntut :

- Peningkatan ketrampilan
- Kedisiplinan
- Kemampuan manajemen
- Kepemimpinan efektif

1. Pendahuluan

Dalam menghadapi era globalisasi ekonomi pada abad ke 21, kita harus mengevaluasi perkembangan perekonomian baik secara nasional maupun regional, sehingga dapat diambil langkah langkah yang tepat agar perekonomian kita dapat sejajar dengan perekonomian dunia, dalam arti mampu memanfaatkan peluang pasar dunia yang semakin terbuka dan mengharuskan kita membuka selebar lebarnya pintu perekonomian bagi masuknya produk, jasa dan modal dari luar negeri. Sebaliknya produk domestik dan berbagai jasa yang dihasilkan juga dapat bebas masuk bersaing di pasar negara lain. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyoongsong perekonomian terbuka dan perdagangan bebas maka keberadaan data dan informasi mengenai kekuatan ekonomi kita sangat penting. Dan melalui usaha menghimpun data dan informasi akan memberi gambaran yang lebih transparan tentang kesiapan kita dalam menghadapi perekonomian terbuka.

Dalam pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua, kita bertekad untuk tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Titik berat pembangunan masih tetap pada pembangunan ekonomi, yang menjadi pendorong pembangunan dibidang bidang lainnya.

Mengingat AFTA sudah diambang pintu maka seharusnya kita melihat dan mengkaji ulang sampai sejauh mana kesiapan kita, langkah langkah yang sudah diambil untuk berdiri sejajar dengan negara lain.

Pokok masalah yang timbul adalah bangunan akses pasar yang ada kita manfaatkan secara optimal, sehingga diperoleh suatu jawaban yang pasti mengenai bagaimana kita mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi, yang semuanya itu dipengaruhi oleh faktor faktor yang sangat dominan yaitu, kualitas sumber daya manusia yang menuntut peningkatan ketrampilan, kedisiplinan, kemampuan manajemen, serta kepemimpinan yang efektif dan tepat dari para pelaku ekonomi dan aparat pemerintah.

2. Kondisi Perekonomian

Ditinjau dari berbagai sektor ekonomi, Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu daerah yang cukup potensial dan relatif bertahan dalam menghadapi gejolak meneter selama ini. Bila ditinjau dari kondisi perekonomian dipertengahan tahun 1997 sampai sekarang, yang ditandai dengan keadaan ketidak pastian ekonomi, yang disebabkan anjlok nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, pada akhirnya berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional.

Rupiah jatuh
pertumbuhan
ekonomi
turun

Pada tahun ke empat PELITA IV perekonomian Daerah Istimewa Aceh Masih memperlihatkan perkembangan yang mengembirakan. Secara riil menurut harga konstan tahun 1993, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan migas terus naik dari tahun ke tahun yaitu 11,03 triliun pada tahun 1994 menjadi 11,19 triliun pada tahun 1995, 11,46 triliun tahun 1996 dan tahun 1997 terjadi sedikit penurunan yaitu sebesar 11,45 triliun.

Hal ini menggambarkan perekonomian Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1997 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,14 persen (dengan migas), sedangkan tanpa migas yang merupakan nilai tambah yang benar benar dikuasai Daerah Istimewa Aceh secara riil adalah 5,29 triliun tahun 1994 naik menjadi 5,76 triliun tahun 1995, pada tahun 1996 menjadi 6,20 triliun sedangkan untuk tahun 1997 menjadi 6,53 triliun.

Tabel 1. PDRB Propinsi Daerah Istimewa Aceh 1994-1997 (Milyar rupiah)

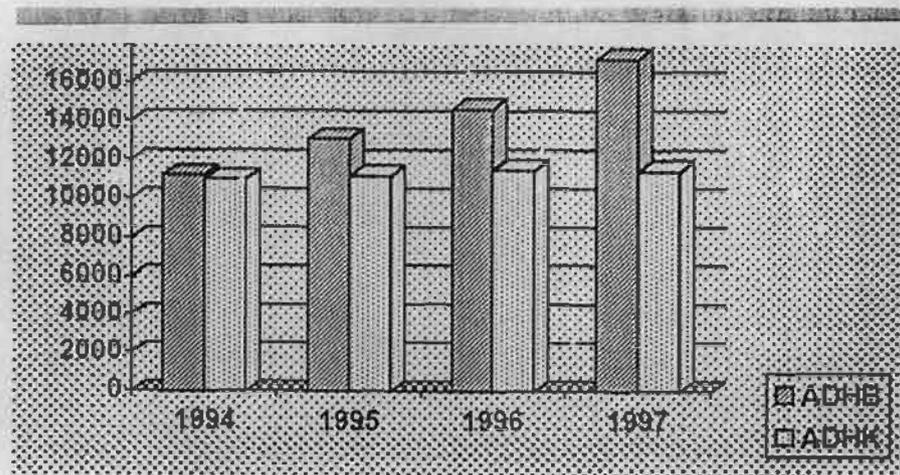
Uraian	PDRB				Pertumbuhan			
	1994	1995	1996*)	1997**)	1994	1995	1996*)	1997**)
ADHB 1)								
Migas	11244.01	13061.23	14636.99	17229.09	3.31	16.43	11.81	17.71
Non Migas	5787.37	7163.98	8232.96	9287.04	19.91	23.79	14.92	12.80
ADHK 2)								
Migas	11026.16	11186.67	11463.29	11447.33	1.31	1.46	2.47	-0.14
Non Migas	5294.95	5756.88	6199.55	6529.58	9.71	8.72	7.69	5.32

Sumber : BPS Prop Daerah Istimewa Aceh

- *) Angka Perbaiki 1) Atas Dasar Harga Berlaku
 **) Angka Sementara 2) Atas Dasar Harga Konstan

Grafik .1 PDRB Propinsi Daerah Istimewa Aceh 1994-1997

Pertumbuhan
Ekonomi
DI Aceh
selama
PELITA VI
Melampaui
Target



Bila dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah daerah selama PELITA VI sebesar 7,5 persen, maka pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Aceh selama PELITA VI berada diatas pertumbuhan yang ditetapkan yaitu rata rata pertahun mencapai 7,86 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahunan adalah tahun 1994 mencapai 9,71 persen, tahun 1995 sebesar 8,72 persen, tahun 1996 mencapai 7,69 persen sedangkan laju pertumbuhan ekonomi untuk tahun 1997 mencapai 5,32 persen.

Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Aceh secara menyeluruh tidak terlepas dari dukungan pertumbuhan sektoralnya. Sektor pertanian merupakan sektor andalan di Daerah Istimewa Aceh yang terus dipacu tingkat pertumbuhannya. Pada tahun 1997 sektor ini mengalami pertumbuhan 6,33 persen. Kenaikan sektor ini didukung oleh pertumbuhan sub sektor perikanan sebesar 19,61 persen, sub sektor peternakan sebesar 10,37 persen, sub sektor perkebunan sebesar 9,01 persen, sub sektor kehutanan 7,78 persen sedangkan sub sektor tanaman bahan makanan mengalami penurunan sebesar -1,35 persen.

Sektor sektor yang pada tahun 1997 mengalami kenaikan di atas 10 persen hanya diperlihatkan oleh dua sektor yakni sektor pertambangan / penggalian sebesar 13,17 persen dan sektor listrik 35,44 persen. Sedangkan sektor lain masih di bawah 10 persen yakni pertanian (6,33 persen), industri pengolahan (5,18 persen), konstruksi (3,38 persen); perdagangan, hotel dan restoran (8,87 persen), pengangkutan dan komunikasi (7,99 persen); keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-14,48 persen), dan sektor jasa jasa sebesar (0,57 persen).

Pertumbuhan
Sektor
Pertanian
Hanya sebesar
6,33 %

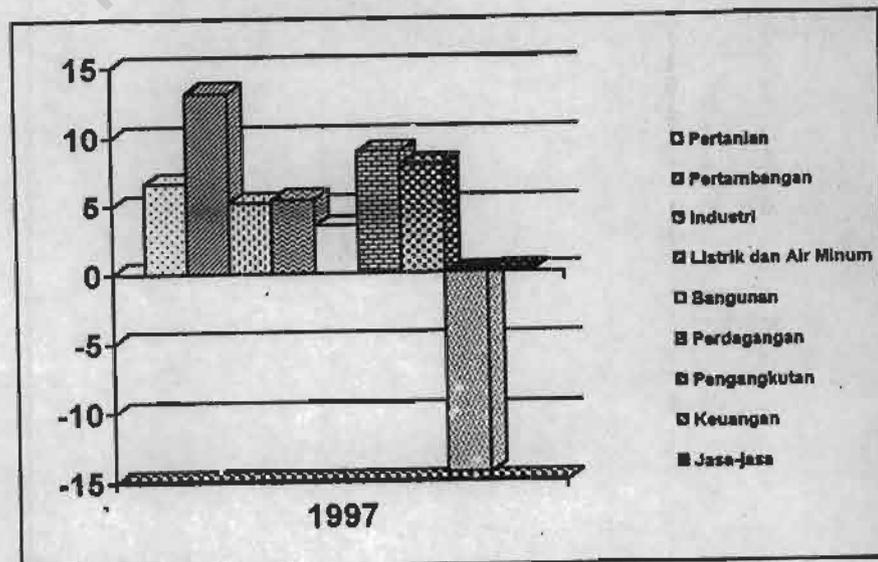
Turunnya pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 1997 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,44 persen dipengaruhi oleh turunnya sub sektor tanaman bahan makanan yang mencapai angka -1,35 persen. Penyebab turunnya sub sektor tanaman bahan makanan adalah faktor perubahan iklim kemarau yang panjang (el nino), dan mengakibatkan turunnya produksi padi sebesar -4,74 persen.

Tabel. 2 Laju Pertumbuhan PDRB dan Distribusi PDRB Daerah Istimewa Aceh Tahun 1996 - 1997 (non migas)

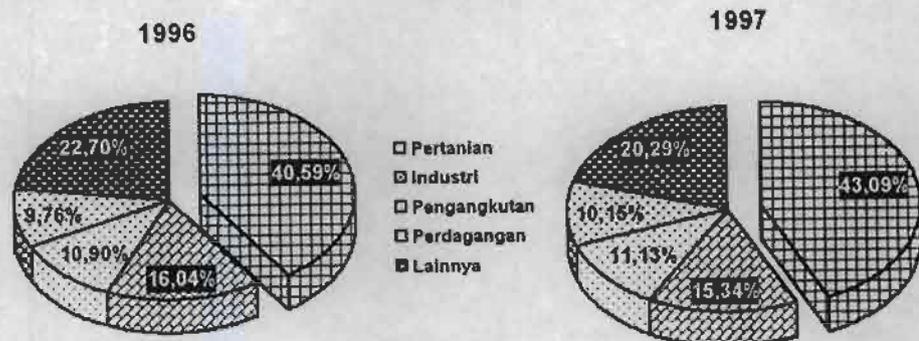
Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Distribusi PDRB	
	1996*)	1997**)	1996*)	1997**)
1. Pertanian	7.44	6.63	41.00	43.09
2. Pertambangan dan Penggalian	6.18	13.17	1.30	1.40
3. Industri Pengolahan	15.76	5.18	16.20	15.34
4. Listrik dan Air Minum	6.60	35.44	0.29	0.35
5. Bangunan/Konstruksi	6.42	3.38	9.06	8.58
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.76	8.87	9.86	10.15
7. Angkutan dan Komunikasi	6.37	7.99	11.01	11.13
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9.94	-14.43	2.88	2.21
9. Jasa jasa	1.65	0.16	8.42	7.75
PDRB	7.69	5.32	100	100

Keterangan: *) Angka Perbaiki **) Angka Sementara

Grafik.2 Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Aceh Tahun 1997 (non migas)



Grafik.3 Peranan Sektorial PDRB 1996 dan 1997



3. Peranan Sektor Ekonomi

Peranan Sektor Industri Pengolahan berada di urutan Kedua

Akibat keaneka-ragaman tingkat pertumbuhan sektoral maka peranan masing masing sektor dalam struktur perekonomian di Daerah Istimewa Aceh cukup bervariasi.

Bila dilihat masing masing sektor ADHB non migas maka sektor pertanian merupakan sektor andalan di propinsi Daerah Istimewa Aceh, dimana sektor ini mempunyai andil sebesar 43,02 persen pada tahun 1997 terhadap total PDRB Daerah Istimewa Aceh. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 41,00 persen.

Disamping itu, sektor Industri Pengolahan yang diharapkan dapat menopang perekonomian Daerah Istimewa Aceh pada masa yang akan datang, peranannya mencapai 15,34 persen pada tahun 1997 dan 16,20 persen pada tahun 1996, dan sektor ini menduduki peringkat kedua.

Sektor Pertanian merupakan Primadona di D. I. Aceh

Turunnya peranan sektor Industri Pengolahan pada tahun 1997 dipengaruhi oleh depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika yang berpengaruh terhadap seluruh kegiatan perindustrian yang ada. Diprediksikan untuk tahun 1998 ini akan terpuruk hingga 10 persen.

Sektor pengangkutan dan komunikasi menduduki urutan ketiga dalam kontribusinya terhadap perekonomian Daerah Istimewa Aceh, dimana pada tahun 1996 peranannya 11,01 persen meningkat menjadi 11,13 persen pada tahun 1997. Diikuti pula oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang pada tahun 1997 kontribusinya mencapai 10,15 persen. Sedangkan sektor sektor yang lain peranannya masih dibawah 10 persen.

4. PDRB Perkapita

Indikator lain yang dapat dipergunakan untuk menilai dampak kebijaksanaan pembangunan adalah PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita, angka ini akan menggambarkan rata rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan Pendapatan Regional perkapita merupakan PDRB yang telah dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung netto dan sudah di tambah dengan transfer netto dibagi dengan penduduk pertengahan tahun.

Untuk menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan, maka baik PDRB perkapita maupun Pendapatan Regional perkapita, perlu dibarengi dengan berbagai data penunjang seperti harapan hidup, melek huruf dan akses akses pendidikan lainnya.

Tabel.3 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Propinsi Daerah Istimewa Aceh (juta rupiah)

TAHUN	PDRB Perkapita		Pendapatan Regional Perkapita	
	Migas	Non Migas	Migas	Non Migas
ADHB				
1993	3.02	1.34	2.76	1.18
1994	3.07	1.58	2.80	1.40
1995	3.50	1.91	3.20	1.70
1996	3.75	2.11	3.43	1.88
1997	4.29	2.31	3.95	2.07
ADHK				
1993	3.02	1.34	2.76	1.18
1994	3.02	1.45	2.74	1.27
1995	2.99	1.54	2.72	1.35
1996	2.94	1.59	2.66	1.40
1997	2.85	1.63	2.58	1.43

PDRB
Perkapita
Migas 4,29 juta
rupiah dan Non
migas 2,31 juta
rupiah

Dari tabel. 3 diperoleh gambaran bahwa baik PDRB perkapita maupun pendapatan regional perkapita (non migas) selama tahun 1997 dibandingkan tahun tahun sebelumnya mengalami kenaikan, kenaikan tersebut terjadi baik diperhitungan ADHB maupun ADHK.

Pada tahun 1997 PDRB perkapita ADHB adalah 2,31 juta rupiah, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 9,60 persen dibandingkan dengan tahun 1996 yang besarnya 2,11 juta rupiah. Sedangkan pendapatan regional perkapita ADHB pada tahun 1997 sebesar 2,07 juta rupiah, yang berarti naik sebesar 10,07 persen dibandingkan tahun 1996 yang besarnya 1,88 juta rupiah.

PDRB perkapita ADHK '93 pada tahun 1997 (tanpa migas) sebesar 1,63 juta rupiah dan tahun 1996 sebesar 1,59 juta rupiah, berarti terjadi kenaikan sebesar 2,34 persen. Sedangkan untuk pendapatan regional perkapita tahun 1997 sebesar 1,43 juta rupiah dan tahun 1996 sebesar 1,40 juta rupiah berarti ada kenaikan sebesar 2,40 persen.

Bila unsur migas diperhitungkan maka PDRB perkapita Daerah Istimewa Aceh ADHB tahun 1997 sebesar 4,29 juta rupiah dan terjadi kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,37 persen atau sebesar 3,75 juta rupiah tahun 1996. Sedangkan pendapatan regional perkapita pada tahun 1997 sebesar 3,95 juta rupiah dan tahun 1996 sebesar 3,43 juta rupiah, berarti terjadi peningkatan sebesar 15,14 persen.

Jika dilihat PDRB perkapita ADHK dengan migas maka besarnya pada tahun 1997 sebesar 2,85 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 1996 mencapai 2,94 juta rupiah dan terjadi penurunan sebesar sebesar -2,97 persen. Begitu pula halnya dengan pendapatan regional perkapita. Pada tahun 1997 juga terjadi penurunan sebesar -3,33 persen.

Bila diamati dalam tabel.3 maka baik pada PDRB perkapita maupun pendapatan regional perkapita ADHK dengan migas terjadi penurunan sejak dari tahun 1993. Hal ini memberi petunjuk bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir produksi migas di Daerah Istimewa Aceh terus menurun

5. PDRB Menurut Penggunaan

PDRB menurut penggunaan untuk propinsi Daerah Istimewa Aceh belum dipisahkan antara non migas dengan migas, berarti bila melihat PDRB penggunaan Daerah Istimewa Aceh termasuk didalamnya migas.

Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Aceh menurut pengeluaran sangat dipengaruhi konsumsi rumah tangga yang peranannya mencapai hampir 40 persen.

Komponen konsumsi rumah tangga ini, bila dilihat atas dasar harga berlaku mencapai 4.737,45 milyar rupiah pada tahun 1996 dan naik menjadi 5.596,74 milyar rupiah pada tahun 1997.

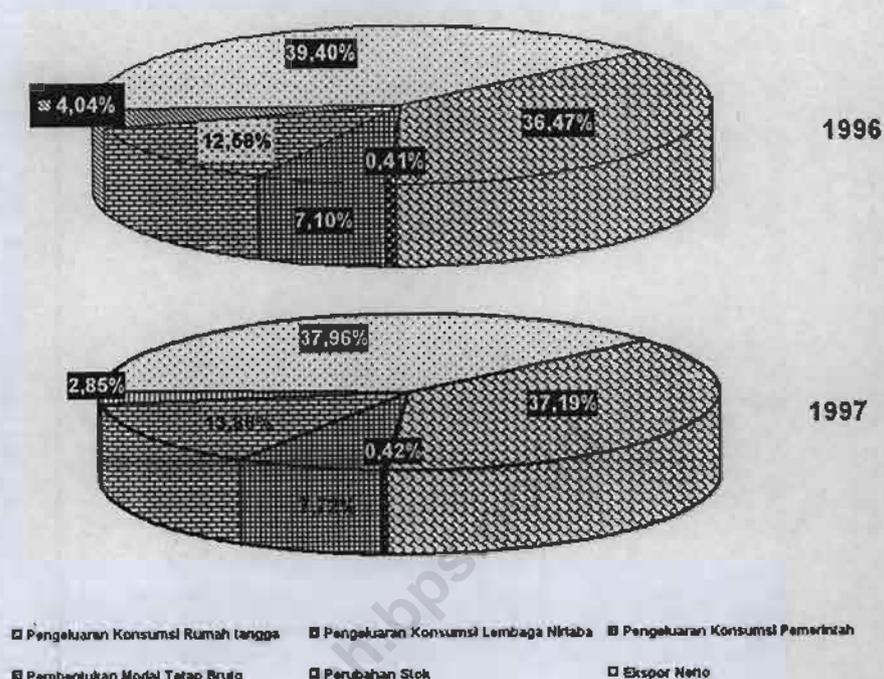
Dilihat masing masing pengeluaran dalam perhitungan ADHK, maka pertumbuhan tertinggi pada tahun 1997 terjadi untuk komponen impor yaitu sebesar 30,30 persen, diikuti pembentukan modal tetap bruto sebesar 10 persen, konsumsi pemerintah sebesar 8,64 persen, konsumsi rumah tangga 1,83 persen, ekspor sebesar 1,39 persen dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 1,33 persen.

Tabel.4 Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Aceh Menurut Pengeluaran Tahun 1996-1997 dan peranannya Terhadap PDRB (persen) Migas

Komponen	Laju Pertumbuhan PDRB		Peranan Terhadap PDRB (ADHK)	
	1996	1997	1996	1997
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.18	1.83	36.47	37.19
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	3.90	1.33	0.41	0.42
3. Pengeluaran Pemerintah	4.69	8.64	7.10	7.72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.86	10.00	12.58	13.86
5. Perubahan Stok	2.49	-29.64	4.04	2.85
6. Ekspor	0.90	1.39	46.43	47.14
7. Impor	2.09	30.30	7.03	9.18
PDRB	2.47	-0.14	100	100

Sumber: BPS Daerah Istimewa Aceh

Grafik.4 Peranan Penggunaan Terhadap PDRB (persen)



Seperti dilihat pada tabel diatas sebagian besar PDRB Daerah Istimewa Aceh dipergunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan ekspor yaitu untuk tahun 1997 masing masing sebesar 37,19 persen dan 37,96 persen.

6. Tingkat Inflasi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tingkat kesejahteraan, terutama kalau tingkat inflasi tinggi. Di negara negara maju tingkat inflasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan inflasi negara berkembang.

Untuk Daerah Istimewa Aceh tingkat inflasi tahun 1997 sebesar 9,90 persen, masih berada diatas tingkat pertumbuhan ekonomi yakni 5,32 persen. Setelah tahun 1996 inflasi Daerah Istimewa Aceh sebesar 6,66 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,69 persen, sedangkan untuk tahun 1998 sampai deangan bulan Oktober sudah mencapai 71,85 persen.

Untuk mengendalikan inflasi tentu perlu peningkatan produktifitas disektor riil, peningkatan sektor riil bisa dilakukan jika setiap pelaku ekonomi memiliki

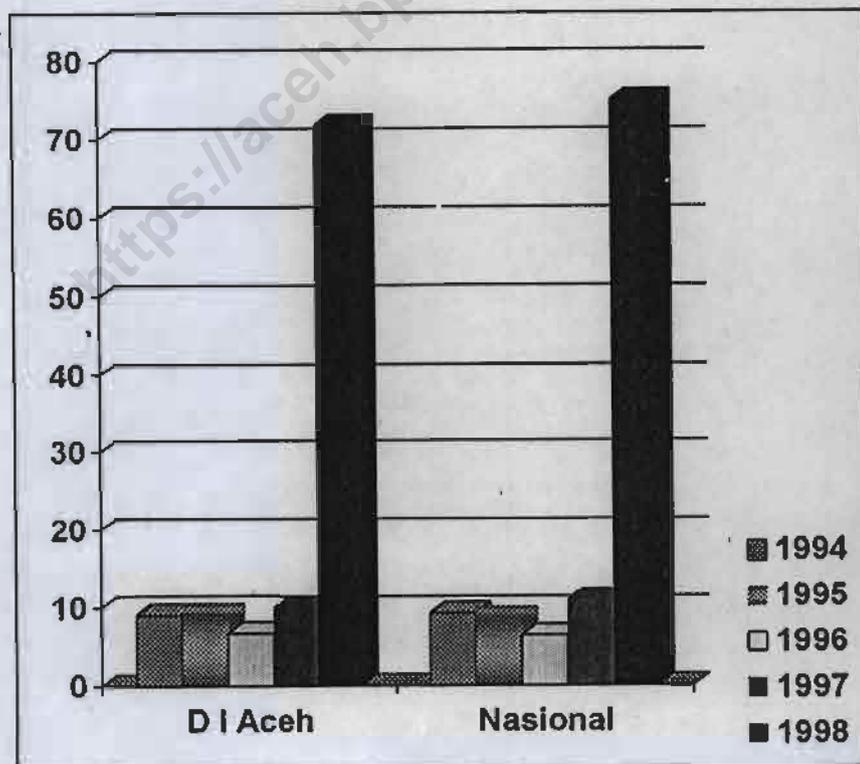
kreasi dan inovasi serta mampu menggunakan teknologi secara maksimal untuk menciptakan barang barang yang bermutu dengan biaya produksi lebih rendah.

Tabel. 5 Laju Inflasi Propinsi Daerah Istimewa Tahun 1994 - 1998

Tahun	Daerah Istimewa Aceh	Nasional
1994	8.97	9.24
1995	9.16	8.64
1996	6.66	6.47
1997	9.90	11.05
1998 *)	71.85	75.00

*) Hingga bulan Oktober 1998

Grafik. 5 Laju Inflasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1994 - 1998



7. Kebutuhan Investasi

Tujuan pokok pembangunan dalam REPELITA VII adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin adii dan merata. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diatas anggaran, pembangunan terutama diarahkan pada pembangunan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi. Hal ini berarti bahwa kegiatan pembangunan harus benar benar diarahkan pada bidang bidang yang strategis agar dapat mendorong dan menggairahkan kembali kemandirian dan partisipasi masyarakat disegala bidang.

Dengan strategi demikian diharapkan sasaran pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi yang diterapkan dalam PELITA sebelumnya dapat dicapai. Laju pertumbuhan yang mantap didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik dan air minum, diharapkan bisa membangkitkan kembali sektor sektor lain yang terpengaruh akibat krisis moneter yang melanda sebagian negara dia Asia. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diharapkan menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Jika diperhatikan, minat investasi untuk menanamkan modal di Daerah Istimewa Aceh tahun 1995 terus meningkat, baik dilihat dari nilai persetujuan terhadap PMA maupun PMDN. Nilai persetujuan terhadap PMA meningkat dari 45,03 juta rupiah tahun 1992 menjadi 1624.8 juta rupiah tahun 1995.

Demikian pula halnya dengan nilai persetujuan terhadap PMDN, pada tahun 1991 baru bernilai 151.4 milyar rupiah maka pada tahun 1996 telah mencapai 1474,8 milyar rupiah.

Dari laporan BKPM, bidang usaha yang diminati oleh investor dalam negeri adalah sektor pertanian dan sektor industri, sementara investasi asing lebih berminat sektor jasa disamping sektorr pertanian.

8. Keterkaitan Investasi dengan Perekonomian Daerah Istimewa Aceh

Salah satu cara untuk melihat keterkaitan investasi dengan perekonomian Daerah Istimewa Aceh adalah dengan cara membandingkan antara *Gross Domestic Investasi (GDI)* dengan *Gross Domestic Saving (GDS)*, sehingga dapat ditentukan investasi yang terjadi Di Daerah Istimewa Aceh tergantung pada pembiayaan dari luar propinsi atau cukup berasal dari dalam Daerah Istimewa Aceh.

Model ekonomi makro memberikan persamaan identitas, yaitu :

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

Dimana : Y = Produk Domestik Regional Bruto

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

X = Ekspor

M = Impor

Model ini memberi gambaran bahwa pendapatan regional Daerah Istimewa Aceh habis digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah, investasi serta keperluan ekspor dan impor. Menurut model makro, porsi investasi (I) terhadap PDRB (Y) mencerminkan *Gross Domestic Investment (GDI)*, sedangkan *Gross Domestic Saving (GDS)* dicerminkan oleh porsi (I + X - M).

Tabel.6 *Gross Domestic Saving (GDS)*, dan *Gross Domestic Investment (GDI)* Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1993 - 1997 (dalam persen)

Rincian	1993	1994	1995	1996	1997
GDS	59.62	55.45	59.00	59.54	59.91
GDI	12.76	16.04	16.04	15.97	15.16
Selisih (GDS - GDI)	46.86	39.41	42.96	43.57	44.75

Sumber : Perhitungan dari Data BPS Daerah Istimewa Aceh

Dari tabel tersebut, memberi indikasi porsi investasi cenderung menurun dimana pada tahun 1994 dan 1995 16,04 persen dan pada tahun 1996 turun menjadi 15,97 persen dan tahun 1997 turun mencapai 15,16 persen. Disamping itu pendapatan regional yang dibentuk selama ini ternyata mampu untuk membiayai investasi di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal ini dicerminkan oleh GDS selalu lebih besar dari pada GDI atau dengan kata lain selisih antara GDS dan GDI selalu positif. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa untuk membiayai investasi di Daerah Istimewa Aceh yang selama ini terjadi masih cukup dengan dana yang tercipta di dalam propinsi itu sendiri tanpa membutuhkan dana dari luar propinsi Daerah Istimewa Aceh (dilihat dari pendapatan regional migas).

Cara lain untuk melihat keterkaitan investasi dengan perekonomian Daerah Istimewa Aceh adalah dengan cara membandingkan nilai ekspor dengan nilai investasi. Hasil yang ada memberi arti bahwa rasio ekspor terhadap investasi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1993 – 1994 masing masing adalah : 0,23 untuk tahun 1993; 0,32 untuk tahun 1994; 0,31 untuk tahun 1995; 0,32 untuk tahun 1996 dan 0,30 untuk tahun 1997. Hal ini menunjukkan sejak tahun 1993 hingga 1997 bahwa hasil ekspor lebih besar dari pada nilai investasi, ini memperlihatkan kecenderungan perkembangan ekonomi di Daerah Istimewa Aceh masih sanggup dibiayai oleh nilai investasi di Daerah Istimewa Aceh itu sendiri.

Keterkaitan investasi dengan perkembangan ekonomi (PDRB) dapat juga digambarkan dengan ukuran *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Ukuran ini merupakan rasio (perbandingan) antara investasi pertambahan output (PDRB). Berdasarkan tabel.7 dapat digambarkan bahwa pada tahun 1996 besarnya tingkat efisiensi dalam menghasilkan suatu output cukup baik yaitu dengan peningkatan output 1 unit membutuhkan investasi sebesar 3.57 unit, sedangkan untuk tahun 1997 terjadi inefisiensi dalam produksi karena untuk menghasilkan output 1 unit membutuhkan 4,65 unit investasi.

Tabel.7 Nilai ICOR tahun 1993 – 1997 Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Tahun	Nilai ICOR
1993	4,11
1994	3,64
1995	3,91
1996	3,57
1997	4,65

Sumber : BPS Daerah Istimewa Aceh

9. Ekspor dan Impor

Kemajuan perekonomian suatu negara dapat juga diukur dari neraca perdagangan luar negeri, yaitu dari sisi ekspor dan impor. Indonesia dalam *open economy* telah dapat meningkatkan perdagangan luar negeri yaitu dengan meningkatkan ekspor terhadap negara besar, seperti Amerika, Jepang, dan Masyarakat Eropa. Hambatan yang dihadapi dalam perdagangan dunia, persaingan dengan negara eksportir lainnya dalam hal harga dan mutu barang. Negara negara

yang sedang berkembang dengan teknologi yang sangat terbatas akan sangat sulit menghadapi persaingan pasar bebas tersebut.

Usaha pemerintah untuk menunjang dan meningkatkan kelancaran ekspor impor antara lain dengan melakukan deregulasi dan debirokrasi, divestifikasi komoditi, dan meningkatkan ekspor non migas.

Nilai ekspor non migas Daerah Istimewa Aceh terdiri dari ekspor hasil pertanian dan industri, secara umum nilai ekspor periode 1993 -1994 terjadi penurunan, namun periode 1995 - 1997 terjadi peningkatan yang cukup berarti, pada tahun 1996 kenaikan sebesar 26,35 persen dan tahun 1997 mengalami kenaikan sebesar 9,34 persen.

Tabel. 8 Nilai Ekspor Impor Non Migas Daerah Istimewa Aceh

No	Tahun	Ekspor		Impor	
		Nilai (US \$)	Perubahan (%)	Nilai (US \$)	Perbedaan (%)
1.	1993	168.049.526	-	213.395.964	-
2.	1994	151.602.455	-9.78	221.525.490	3.81
3.	1995	141.866.626	-6.42	235.570.985	6.34
4.	1996	179.254.551.	26.35	108.843.193	-53.80
5.	1997	196.001.918	9.34	118.860.515	9.20

Sumber : Statistik Ekspor Impor BPS

Meskipun yang diharapkan adalah peningkatan ekspor yang tidak diikuti oleh peningkatan impor. Prosentase impor Daerah Istimewa Aceh selama periode 1993-1997 tertinggi terjadi pada tahun 1997, namun secara riil nilai tertinggi terjadi pada tahun 1995.

Komoditi non migas yang pernah diekspor dari Daerah Istimewa Aceh, tetapi kesinambungannya belum mantap antara lain adalah ekspor hasil pertanian seperti pala, bunga pala, jahe segar, pinang, kura-kura hidup, *small chile*, ikan tuna, jenang, tapioka, chip kentang, damar, ikan hias, dan cumi cumi. Sedangkan ekspor hasil industri meliputi kerajinan *tas*, *pozzoland*, karet konvensional, minyak nilam, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, pipa plastik, *aqua*, kayu gagang sapu, sumpit, dan serat bambu dan tongkat kayu.

Kelangsungan ekspor komoditi ini tidak berkesinambungan disebabkan oleh tidak mantapnya promosi dan pemasaran di pasar luar negeri dan masalah produk itu sendiri karena mutu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar serta juga adanya kebijaksanaan pemerintah.

10. Analisa Perekonomian Daerah Istimewa Aceh Melalui Tabel Input Output

Berdasarkan tabel input output propinsi Daerah Istimewa Aceh, memberikan indikator keterkaitan antara sektor sektor ekonomi. Dalam tabel I-O dapat diperoleh informasi yang disebut mengenai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*). Keterkaitan ke depan disebut juga sebagai indeks daya penyebaran (DP), sedangkan keterkaitan ke belakang disebut dengan indeks daya kepekaan (DK).

Bila keterkaitan ke depan suatu sektor ekonomi tinggi ($DP > 1$) berarti sektor yang bersangkutan berpengaruh besar terhadap perkembangan sektor sektor lainnya. Bila keterkaitan ke belakang suatu sektor ekonomi tinggi ($DK > 1$) berarti sektor ekonomi yang bersangkutan sangat peka terhadap perkembangan sektor sektor yang lainnya.

Dari tabel I-O propinsi Daerah Istimewa Aceh yang tersedia, dapat diperoleh informasi sektor sektor ekonomi dengan keterkaitan ke belakang dan ke depan yang tinggi dapat dilihat pada tabel. 9.

Misalkan sektor keuangan, yang merupakan sektor ekonomi dengan keterkaitan ke depan yang paling tinggi. Bila dilakukan suatu injeksi terhadap sektor ini sebesar 1 unit/rupee, maka kenaikan output sektor ini akan menyebabkan kenaikan penggunaan input sektor sektor lainnya sehingga menyebabkan kenaikan total perekonomian Daerah Istimewa Aceh sebesar 2,162254 unit/rupee. Dengan demikian sektor keuangan merupakan sektor yang mempunyai daya penyebaran yang paling besar.

Dari tabel. 9 juga terlihat sektor industri lainnya merupakan sektor ekonomi dengan keterkaitan ke belakang yang paling tinggi. Bila dilakukan suatu injeksi terhadap sektor ini sebesar 1 unit, kenaikan output sektor ini akan mengakibatkan lebih banyak digunakan oleh sektor sektor lainnya, sehingga menyebabkan kenaikan total perekonomian Daerah Istimewa Aceh 1,977726 unit. Dengan demikian sektor industri lainnya merupakan sektor yang mempunyai derajat kepekaan yang paling besar dengan sektor sektor ekonomi yang lain.

Secara umum terlihat bahwa delapan sektor yang merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan yang relatif tinggi ($DP > 1$) yaitu berurut dari besar ke kecil yaitu sektor : keuangan; listrik dan air minum; bangunan; restoran dan hotel; industri lainnya; jasa jasa; industri makanan, minuman dan tembakau dan sektor angkutan. Sedangkan sektor sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi terdapat tujuh sektor ($DK > 1$) yaitu sektor : industri lainnya; pengilangan minyak bumi; keuangan; padi; perdagangan; pertambangan dan penggalian dan sektor angkutan dan komunikasi.

Dapat disimpulkan bahwa sektor sektor yang dapat menggerakkan roda perekonomian Daerah Istimewa Aceh secara relatif cepat baik dilihat dari keterkaitan ke depan (memakai input dari sektor sektor lain) ataupun keterkaitan ke belakang (outputnya dipakai oleh sektor lain) yaitu ada tiga sektor yaitu sektor industri lainnya, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, dimana ketiga sektor ini harus mendapat perhatian dan investasi yang memadai.

Tabel.9 Sektor Sektor Ekonomi Dengan Keterkaitan Kedepan (DP) Dan Keterkaitan Kebelakang (DK) Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Sektor	Keterkaitan Ke Depan (DP)	Total Daya Penyebaran	Keterkaitan Ke Belakang (DK)	Total Daya Penyebaran
01. Padi	0.674796	1.080239	1.213520	1.933599
02. Tanaman Bahan Makanan	0.662522	1.073337	0.656976	1.107707
03. Tanaman Pertanian Lainnya	0.954896	1.402604	0.809045	1.307496
04. Peternakan dan Hasilnya	0.824382	1.323688	0.808088	1.357919
05. Kehutanan	0.878107	1.264473	0.885201	1.270041
06. Perikanan	0.847470	1.295242	0.657594	1.111721
07. Pertambangan dan Penggalian	0.654919	1.074136	1.172179	1.688444
08. Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	1.197498	1.940904	0.791132	1.183694
09. Industri Lainnya	1.257583	1.598019	2.415484	1.977726
10. Penggilingan Minyak Bumi	0.956773	1.448158	1.524285	1.819958
11. Listrik dan Air Minum	1.604870	1.816358	0.811415	1.283351
12. Bangunan	1.320703	1.675391	0.960951	1.518038
13. Perdagangan	0.741322	1.167687	1.190878	1.805387
14. Restoran dan Hotel	1.306531	1.846811	0.693928	1.143382
15. Angkutan dan Komunikasi	1.051698	1.476399	1.037200	1.610726
16. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.675412	2.162254	1.306382	1.810106
17. Pemerintahan	0.590766	1.000000	0.590766	1.000000
18. Jasa jasa	1.2089986	1.510185	0.884210	1.221236
19. Kegiatan Yang Tidak Jelas Batasannya	0.590766	1.000000	0.590766	1.000000

Sumber : BPS Daerah Istimewa Aceh, Tabel I-O Aceh tahun 1988

RINGKASAN EKSEKUTIF

TITIKUAN EKONOMI

DAERAH ISTIMEWA ACEH

1994 - 1997

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Aceh adalah struktur perekonomian yang masih sangat tradisional dan kurang memperhatikan kegiatan ekonomi di tingkat desa/kelurahan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa/kelurahan.

BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Jakarta, 1997

